

Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)

Vira Carolina¹, Anissa Hakim Purwantini^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Magelang, Indonesia

*email: anissa.hakim@ummgl.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
tax avoidance;
internal control;
family ownership

This study examines the effects of internal control, family ownership, environmental uncertainty, institutional ownership, sales growth and political connections toward tax avoidance. This type of research is quantitative research conducted using secondary data in the form of data from annual reports of manufacturing companies in 2015 to 2019. The sampling method uses purposive sampling and obtained a sample of 110 company samples. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that internal control, family ownership, environmental uncertainty, sales growth and political connections do not affect Tax Avoidance. While institutional ownership has a positive effect on Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengendalian internal, kepemilikan keluarga, ketidakpastian lingkungan, kepemilikan institusional, *sales growth* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data dari laporan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 22 sampel perusahaan. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, kepemilikan keluarga, ketidakpastian lingkungan, *sales growth* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi kepada negara atau badan sebagai wajib pajak dan tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutanganya tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan dibantu oleh beberapa staf pajak. Salah satu cara penghindaran pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan.

Terdapat berbagai kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di Indonesia. Contohnya kasus yang dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Mengakibatkan dampak terhadap negara yaitu menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2009).

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pertama yaitu pengendalian internal. Jika pengendalian internal disuatu perusahaan dalam konsisi baik maka akan mendorong manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tidak membahayakan perusahaan dimasa akan datang. Hal tersebut menjadikan manajemen akan secara otomatis berfikir bijaksana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pajak dan tidak akan melakukan sebuah penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu kepemilikan keluarga. Perusahaan dapat dikategorikan memiliki struktur kepemilikan keluarga apabila terdapat pemegang saham yang memiliki kekuatan pengendali baik satu individu maupun kelompok yang masih dalam keluarga yang sama. Perusahaan yang berdiri dengan struktur kepemilikan keluarga lebih fokus pada biaya reputasi dan penalti. Selain itu, perusahaan keluarga berkonsentrasi pada nilai jangka panjang daripada jangka pendek. Oleh karena itu, mereka kurang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan pajak yang agresif karena mereka peduli terhadap nama atau reputasi perusahaan mereka.

Faktor ketiga yaitu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan seorang manajer untuk memprediksi seluruh faktor sosial dan fisik secara akurat yang nantinya akan berdampak langsung terhadap perilaku manajemen dalam pembuatan keputusan. Disaat manajer tidak mampu memprediksi seluruh faktor tersebut maka akan menyebabkan timbulnya perilaku oportunistik yang akan menyebabkan manajer menghasilkan laporan yang sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga menutup kemungkinan manajer akan melakukan penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Ginting, 2016). Kepemilikan institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional suatu perusahaan. Investor institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hashemi & Zulaikha, 2013).

Faktor kelima yaitu *sales growth* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan, yang nantinya juga akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Astuti *et al.*, 2020). Apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan akan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula. Sehingga perusahaan juga akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan akan besar pula.

Faktor kelima yaitu koneksi politik, yang merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Swingly & Sukartha, 2015). Koneksi politik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan membuat perusahaan tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah. Dimana hal tersebut yang akan membuat perusahaan menerapkan *tax planning* secara makin agresif. Hal tersebutlah yang akan berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Bimo *et al.*, 2019). Perbedaan pertama dalam penelitian ini yaitu menambahkan tiga variabel independen. **Pertama**, variabel kepemilikan institusional karena semakin tinggi kepemilikan saham institusionalnya akan menurunkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Selain itu juga akan mendorong manajer untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal

terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Kedua**, menambahkan variabel *sales growth* yang mana jika **sales growth** meningkat, maka otomatis perusahaan akan mendapatkan profit yang besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* agar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi sedikit. **Ketiga**, menambahkan variabel koneksi politik, karena disaat suatu perusahaan salah satu *stakeholder* atau *shareholder* nya mempunyai koneksi politik maka akan dimanfaatkan oleh manajer untuk berperilaku oportunistik. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari laporan keuangannya menghasilkan laba yang besar namun pajak yang dibayarkannya rendah.

Perbedaan kedua yaitu periode penelitian yang menggunakan tahun 2015-2019. Dikarenakan penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% (Setiawan, 2020).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan muncul dikarenakan terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang kepentingan antara pemilik (*principle*) dengan manajemen (*agen*). Hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agen*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agen*).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sebuah mekanisme pengawasan data untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Skaife *et al.*, 2008). Pengendalian internal yang efektif akan mendorong manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membahayakan perusahaan di masa depan. Menurut *agency theory* masalah dalam pengendalian internal terhadap tindakan penghindaran perpajakan tidak selalu sama. Hal tersebut dikarenakan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergantung dari pihak manajemen (*agen*) dalam melakukan tindakannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan pun akan bebas dari salah saji material dan akan mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

H1: Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan dimana masalah keagenan dapat muncul karena sekelompok pemegang saham pengendali yang mungkin juga terlibat dalam manajemen perusahaan, dapat mengambil alih sebagian kecil pemegang non-keluarga (Kovermann & Wendt, 2019). Berdasarkan *agency theory* masalah keagenan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya karna itu semua bergantung dari seberapa besar efek manfaat yang timbul dari kepemilikan saham yang berasal dari keluarga. Perusahaan yang berdiri dengan struktur kepemilikan keluarga akan cenderung kurang untuk melaukan tindakan pajak yang agresif. Hal tersebut karena mereka peduli dengan reputasi perusahaannya dan lebih berkonsentrasi pada nilai jangka panjang.

H2 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan terjadi karena perubahan elemen bisnis, terutama karena perubahan pasar produk yang diproduksi oleh perusahaan, seperti perubahan pola konsumsi pelanggan dan struktur kompetitif dari produk yang dihasilkan. Menurut *agency theory*, situasi meningkatnya manajemen tidak mampu memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi maka akan menyebabkan perilaku oportunistik menjadi meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan pihak manajemen akan leluasa untuk melakukan *tax avoidance*.

H3 : Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Ginting, 2016). Kepemilikan saham institusional dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal agar nantinya dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut *agency theory*, *principal* diasumsikan hanya tertarik pada tingkat pengembalian saja sehingga *principal* akan berupaya untuk mengarahkan perusahaan agar meminimalkan beban tanggungan pajak.

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Sales Growth

Sales growth merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan, yang nantinya juga akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Astuti *et al.*, 2020). Ketika *sales growth* meningkat maka tingkat *tax avoidance* akan tinggi. Menurut *agency theory*, saat tingkat *sales growth* tinggi maka pihak *agen* akan cenderung melakukan *tax avoidance*. Akan tetapi, dilain sisi *principal* ingin *agen* menghasilkan informasi yang sesuai dengan apa yang terjadi, agar nantinya

dimasa yang akan datang perusahaan tidak mengalami masalah yang dikarenakan asimetri informasi.

H5 : Sales Growth berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Swingly & Sukartha, 2015). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus yang akan membuat perusahaan menerapkan *tax planning* secara makin agresif. Menurut *agency theory*, pihak manajemen akan memanfaatkan salah satu stakeholdernya yang mempunyai koneksi politik agar hasil dari laporan keuangannya menghasilkan laba yang kecil sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi rendah.

H6 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hanya 22 perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel yang akan dilakukan dalam adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2015-2019.
2. Perusahaan melampirkan data laporan keuangan tahunan selama periode 2015-2019 secara berturut-turut.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan tersebut tidak mengalami rugi sebelum pajak pada periode 2015-2019 secara berturut-turut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Sumber data yang diperoleh dari website www.idx.com.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan

perpajakan.. Menurut Hanlon (2005) *tax avoidance* dapat dihitung melalui *Current ETR* yaitu mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung *Current ETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}_t}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu prosedur pengawasan yang digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Rae et al., 2017). Pengendalian internal juga dapat untuk memastikan bahwa manajemen tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan. Pengendalian internal diukur dengan menggunakan metode penilaian. Penilaian untuk efektivitas pengendalian internal terdiri dari 4 item pernyataan yaitu:

- a. Apakah tujuan pengendalian internal dinyatakan dengan jelas?
- b. Manajemen bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal?
- c. Pernyataan tentang efektivitas pengendalian internal, memiliki unit pengendalian internal?
- d. Apakah perusahaan menerapkan manajemen risiko?

Jika perusahaan mengungkapkan informasi, itu akan diberi skor 1 dan 0 jika tidak diungkapkan. Skor total diperoleh dari skor total masing-masing perusahaan dibagi dengan jumlah pertanyaan (Deumes & Knechel, 2008).

Struktur Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai presentase kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan oleh anggota keluarga, dimana kepentingan keluarga terhadap perusahaan akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah presentase saham tersebut (Apriliani, 2015). Struktur kepemilikan keluarga dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 10% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 10% (Claessens *et al.*, 2000).

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan seorang manajer untuk memprediksi seluruh faktor social dan fisik secara akurat yang akan secara langsung mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembuatan keputusan di suatu perusahaan (Bimo *et al.*, 2019). Ketidakpastian lingkungan dapat diukur dengan menggunakan model yang digunakan oleh Gong *et al.*, (2009) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Ketidakpastian lingkungan} = \frac{\text{Standar Deviasi Penjualan}_t}{\text{Total Aset}_t}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan tersebut biasanya dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, lembaga asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976), kepemilikan saham institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Sales Growth

Sales growth menurut Kasmir (2016) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Menurut Sartono (2002) cara menghitung *sales growth* dengan proksi *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Sales growth} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}}$$

Koneksi Politik

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah (Munawaroh & Ramdany, 2019). Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Pengukuran variabel ini menggunakan dummy seperti yang digunakan oleh Wati (2017) angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan koneksi politik mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wati (2017) yaitu:

- a) jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik,
- b) jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,
- c) jika ada salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis sebuah data yang disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas suatu keadaan atau karakteristik data.

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan IBM SPSS 25. Hipotesis H₁, H₂, H₃, H₄, H₅ dan H₆ dalam penelitian akan diuji dengan menggunakan model empiris sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PI + \beta_2 KK + \beta_3 KL + \beta_4 KI + \beta_5 SG + \beta_6 KP + e$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PI = Pengendalian Internal

KK = Kepemilikan Keluarga

KL = Ketidakpastian Lingkungan

KI = Kepemilikan Institusional

SG = *Sales Growth*

KP = Koneksi Politik

e = Tingkat Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ETR	110	1,00	1,61	1,2414	0,09575
PI	110	0,00	1,00	0,8182	0,38746
KK	110	0,00	1,00	0,4727	0,50154
KL	110	0,01	0,75	0,2524	0,14017
KI	110	0,02	1,00	0,5423	0,30584
SG	110	0,02	1,33	0,5455	0,47847
KP	110	0,00	0,82	0,2722	0,30363

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan masing-masing variabel:

1. Pengendalian internal (PI) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai *mean* dari variabel pengendalian internal sebesar 0,8182, artinya nilai mean mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki pengendalian internal yang tinggi. Standar deviasi pengendalian internal sebesar 0,38746 yang berarti bahwa penyebaran data pengendalian internal sejumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,8182 dari nilai *mean*. Hasil tersebut

- menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.
2. Kepemilikan keluarga (KK) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai *mean* dari variabel kepemilikan keluarga sebesar 0,47, artinya nilai *mean* mendekati nilai terendah yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan masih memiliki kepemilikan keluarga yang rendah. Standar deviasi kepemilikan keluarga sebesar 0,502, yang berarti bahwa penyebaran data kepemilikan keluarga sejumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,502 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.
 3. Ketidakpastian Lingkungan (KL) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,75. Nilai *mean* dari variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 0,2524, artinya nilai *mean* mendekati nilai terendah yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan masih memiliki ketidakpastian lingkungan yang rendah. Standar deviasi pada variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 0,14017, yang berarti bahwa penyebaran data ketidakpastian lingkungan dengan jumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,14017 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.
 4. Kepemilikan institusional (KI) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,02 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai *mean* dari variabel kepemilikan institusional sebesar 0,5423, artinya nilai *mean* mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,30584 yang berarti bahwa penyebaran data kepemilikan institusional dengan jumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,6909 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.
 5. *Sales growth* (SG) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,02 dan nilai maksimum sebesar 1,33. Nilai *mean* dari variabel *sales growth* sebesar 0,5455, artinya nilai *mean* tersebut mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki *sales growth* yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,47847, yang berarti bahwa penyebaran data *sales growth* dengan jumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,47847 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel *sales growth* pada 110 perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.
 6. Koneksi politik (KP) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,82. Nilai *mean* dari variabel koneksi politik sebesar 0,2722, artinya nilai *mean* tersebut mendekati nilai tertinggi

yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki koneksi politik yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,30363 yang berarti bahwa penyebaran data koneksi politik dengan jumlah 110 sampel perusahaan menyimpang sebesar 0,30363 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel koneksi politik pada 110 perusahaan memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai *mean*.

7. *Tax avoidance* (ETR) dengan jumlah sampel sebanyak 110 perusahaan memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 1,61. Nilai *mean* dari variabel *tax avoidance* sebesar 0,2722, artinya nilai *mean* tersebut mendekati nilai terendah yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan masih memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah. Standar deviasi sebesar 0,30363 yang berarti bahwa penyebaran data *tax avoidance* dengan jumlah 110 sampel tersebut memiliki tingkat penyimpangan sebesar 0,30363 dari nilai *mean*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel *tax avoidance* sebanyak 110 perusahaan memiliki tingkat penyimpangan yang lebih kecil dari nilai *mean*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

N	110
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,193
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,120

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 1,193 dengan signifikansi 0,120. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
PI	0,904	1.106	Tidak ada multikolonieritas
KK	0,915	1.093	Tidak ada multikolonieritas
KL	0,956	1.046	Tidak ada multikolonieritas
KI	0,842	1.188	Tidak ada multikolonieritas
SG	0,763	1.311	Tidak ada multikolonieritas
KP	0,879	1.137	Tidak ada multikolonieritas

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.270 ^a	.073	.018	.08377	1.916

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan sampel berjumlah 110 ($n = 110$) dan jumlah variabel ($k=22$), maka pada *Durbin-Watson* tabel akan didapatkan nilai dU sebesar 1,8054. Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,916 terletak diantara nilai dU dan nilai $4-dU$. Dengan demikian, ditunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* 1,916 lebih besar dari nilai dU sebesar 1,8054 dan lebih kecil dari nilai $(4-dU)$ sebesar 2,1946. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig.
(Constant)	-0,977	0,331
PI	0,585	0,560
KK	-0,422	0,674
KL	0,617	0,539
KI	1,757	0,082
SG	-1,758	0,082
KP	-0,481	0,632

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel 4.5 dapat diketahui semua variabel independen tidak ada yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 atau tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel *absolut* residual, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak ada indikasi terjadinya heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Koefisien Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,221	0,030		40,200	0,000
PI	-0,036	0,023	-0,146	-1,561	0,122
KK	0,021	0,018	0,109	1,175	0,243
KL	-0,089	0,062	-0,131	-1,433	0,155
KI	0,073	0,020	0,356	3,672	0,000
SG	0,016	0,020	0,078	0,768	0,444
KP	-0,003	0,030	-0,010	-0,105	0,917

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil koefisien regresi tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$ETR = 1,221 - 0,036 PI + 0,021 KK - 0,089 KL + 0,073 KI + 0,016 SG - 0,003 KP$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,221 mengindikasikan bahwa pengendalian internal (PI), kepemilikan keluarga (KK), ketidakpastian lingkungan (KL), kepemilikan institusional (KI), *sales growth* (SG) dan koneksi politik (KP) dianggap konstan, maka rata-rata tingkat *tax avoidance* sebesar 1,221.
2. Nilai koefisien regresi pengendalian internal (PI) adalah sebesar -0,036 mengindikasikan bahwa setiap terjadi pengendalian internal (PI) sebesar satu satuan, maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar -0,036
3. Nilai koefisien regresi kepemilikan keluarga (KK) adalah sebesar 0,021 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan kepemilikan keluarga (KK) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,021
4. Nilai koefisien regresi ketidakpastian lingkungan (KL) adalah sebesar -0,089 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan ketidakpastian lingkungan (KL) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar -0,089.
5. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional (KI) adalah sebesar 0,073 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan kepemilikan institusional (KI) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,073.
6. Nilai koefisien regresi *sales growth* (SG) adalah sebesar 0,016 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan *sales growth* (SG) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,016.
7. Nilai koefisien regresi koneksi politik (KP) adalah sebesar -0,003 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan koneksi politik (KP) sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar -0,003.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.270 ^a	.073	.018	.08377

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 7 besarnya *adjusted R Square* sebesar 0,018. Hal tersebut menunjukkan kemampuan pengendalian internal, kepemilikan keluarga, ketidakpastian lingkungan, kepemilikan institusional, *sales growth* dan koneksi politik dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 0,018 atau 18% sedangkan sisanya 82% (100% - 18%) dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model penelitian.

Uji Statistik F (*Goodness of Fit*)

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

F hitung	F tabel	Sig.
3,859	2,19	0,000 ^b

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa model regresi penelitian ini memiliki nilai F hitung sebesar 3,859 sedangkan besarnya F tabel didasarkan pada $df1 = k = 6$ dan $df2 = n-k-1 = 103$ diperoleh nilai F tabel sebesar 2,19. hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($3,859 > 2,19$) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka variabel pengendalian internal, kepemilikan keluarga, ketidapastian lingkungan, kepemilikan institusional, *sales growth* dan koneksi politik mampu menjelaskan variabel *tax avoidance*. Sehingga model penelitian ini dapat dikatakan bagus dan layak untuk digunakan (*Goodness of Fit*).

Uji Statistik t

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T

Hipotesis	t tabel	t hitung	Sig	Keterangan
H1 :	-1.98326	-2.246	0,016	H1 Tidak diterima
KK	1.98326	1.175	0,243	H2 Tidak diterima
KL	-1.98326	-1.433	0,155	H3 Tidak diterima
KI	1.98326	3.672	0,000	H4 Tidak Diterima
SG	1.98326	.768	0,444	H5 Tidak diterima
KP	-1.98326	-.105	0,917	H6 Tidak diterima

Sumber: data sekunder (2020) diolah kembali

Berdasarkan tabel 9 dapat dijabarkan pengaruh masing-masing variabel dependen sebagai berikut :

a. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t \text{ hitung} = -2,246 < t \text{ tabel} = -1,98326$ dan $p \text{ value} = 0,122 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₁ Tidak diterima**.

b. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t \text{ hitung} = 1,175 < t \text{ tabel} = 1,98326$ dan $p \text{ value} = 0,243 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₂ tidak diterima**.

c. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t \text{ hitung} = -1,433 < t \text{ tabel} = 1,98326$ dan $p \text{ value} = 0,155 > \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₃ tidak diterima**.

d. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa t hitung = 3,672 > t tabel = 1,98326 dan p value = 0,000 < α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₄ Tidak diterima**.

e. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa t hitung = 0,768 > t tabel = 1,98326 dan p value = 0,444 > α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₅ tidak diterima**.

f. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa t hitung = -0,105 < t tabel = 1,98326 dan p value = 0,917 > α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga **H₆ Tidak diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena informasi tentang pengendalian internal yang diungkapkan dalam laporan keuangan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gallemore & Labro (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bimo *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini dapat diartikan bahwa kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi nilai ETR yang dihasilkan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan masalah keagenan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Jadi, dapat dikatakan ketika perusahaan mempunyai kepemilikan saham keluarga bukan sebagai tolak ukur bahwa perusahaan akan atau bahkan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tj *et al.* (2019) dan Oktavia & Hananto (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diartikan bahwa Ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata perusahaan masih belum bisa menetapkan pola strategi bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun. Akibat tidak konsistennya penerapan strategi, maka dalam memperoleh keuntungan dan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan tidak didasarkan dengan strategi yang dipakai. Sehingga apapun strategi yang digunakan tidak mempengaruhi intensitas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Sidharta (2008) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini diartikan bahwa struktur kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat *tax avoidance*. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat. Semakin banyak kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini akan memperbesar intensitas *tax avoidance* karena pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi yaitu dengan melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Fauziyah, *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusional dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diartikan bahwa tinggi rendahnya *sales growth* tidak mempengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini karena Semakin tinggi *sales growth* perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggungnya. Peningkatan *sales growth* akan menjadi perhatian dari petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi *sales growth* maka

akan semakin besar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat menjadikan manajemen menjadi lebih waspada didalam melakukan kebijakan perpajakannya (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Hasil penelitaln ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015) yang menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Purwanti & Sugiyarti (2017) juga menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah seperti BUMN diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak, dikarenakan sudah diberi kepercayaan oleh Negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Marfu'ah, 2015). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Marfu'ah (2015) dan Dharma & Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik tidak berpengaruh karena semakin tinggi atau tidaknya tingkat koneksi politik tidak mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tida konsisten dengan penelitian dari Sudibyoy & Jianfu (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan variabel kepemilikan keluarga, ketidakpastian lingkungan, koneksi politik dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen pengendalian internal, kepemilikan keluarga, ketidakpastian lingkungan, kepemilikan institusional, *sales growth* dan koneksi politik saja. Sehingga masih banyak variabel yang memengaruhi *tax avoidance*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai generalisasi pada sektor perusahaan lain di Bursa Efek Indonesia.

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada periode penelitian 2015-2019, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai generalisasi pada semua periode penelitian.

Saran

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat memperluas cakupan variabel penelitian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjelasan faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* misalnya ukuran perusahaan yang mana besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal itu karena, semakin besar ukuran perusahaan maka untuk menjaga citra perusahaan dimata publik pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas penggunaan sampel, tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi menambah sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Misalnya menggabungkan pengamatan pada perusahaan pertambangan, manufaktur, dan perusahaan sektor utama yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh hasil penelitian yang konsisten.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat memperluas periode penelitian, tidak hanya periode tahun 2015 – 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar AKuntansi Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 2(2615–3343), 1–10.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210.
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. (2000). The separation of ownership and control in East Asia corporation. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 81–112.
- Deumes, R., & Knechel, W. R. (2008). Economic incentives for voluntary reporting on internal risk management and control systems. *Auditing*, 27(1), 35–66.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali*, 15.

- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 1–12.
- Gong, G., Li, L. Y., & Xie, H. (2009). The association between management earnings forecast errors and accruals. *The Accounting Review*, 84(2), 497–530.
- Hanlon, M. (2005). The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Book-Tax Differences. *The Accounting Review*, 80(1), 137–166.
- Hanum Rodhian Hashemi, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011)*, 2, 201–210.
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83–124.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 152.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal Accounting Public Policy*, 30, 50–70.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Munawaroh, M. A., & Ramdany, R. (2019). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Oktavia, R., & Hananto, H. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, dan Manajemen Keluarga Pemilik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Periode 2013-2015. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 12(1).
- Prima, B. (2009). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice->

laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta

- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Rae, K., Sands, J., & Subramaniam, N. (2017). Associations among the Five Components within COSO Internal Control-Integrated Framework as the Underpinning of Quality Corporate Governance. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(1), 28–54.
- S, S., & U, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate – governance practices: evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 43(1), 1–27.
- Sartono, A. (2002). *Manajemen Keuangan; Aplikasi dan Teori*. BPFE-Yogyakarta.
- Setiawan, D. A. (2020). *Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi*. DDTC.News. www.news.ddtc.co.id
- Skaife, H. A., Kinney, J. W. R., Collins, D. W., & Lafond, R. (2008). The Effect of SOX Internal Control Deficiencies and Their Remediation on Accrual Quality. *The Accounting Review*, 83(1), 217–250.
- Sudibyoy, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3continued2), 279–283.
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 47–62.
- Tj, R. M. R. E., Nazar, M. R., Asalam, A. G., & Husna, A. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 2(2), 61–73.
- Wati, L. N. (2017). Board of commissioner’s effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(November), 255–270.